

# Kebijakan Publik dalam Penanggulangan Krisis Global dan Dampaknya terhadap Masyarakat

Suci Aulia\*, Rilla Indriani, Nurcahyati, Dila Erlianti

Yayasan Pendidikan Lancang Kuning Laksamana Raja Dilaut Dumai Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lancang Kuning

DOI:

<https://doi.org/10.47134/villages.v7i2.433>

\*Correspondence: Suci Aulia

Email: [suciaulia0604@gmail.com](mailto:suciaulia0604@gmail.com)

Received: 07-04-2026

Accepted: 19-05-2026

Published: 28-06-2026



**Copyright:** © 2026 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran kebijakan publik dalam penanggulangan krisis global serta mengkaji dampaknya terhadap masyarakat dalam hal ekonomi, sosial, dan kelembagaan. Krisis global yang dipicu oleh pandemi COVID-19 dan konflik geopolitik seperti ketegangan antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran telah menimbulkan tekanan signifikan terhadap stabilitas ekonomi dunia, termasuk kenaikan harga energi, inflasi, serta gangguan rantai pasok global. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode analisis literatur (literature-based analysis) yang bersumber dari jurnal ilmiah nasional dan internasional, laporan lembaga global, serta dokumen resmi pemerintah dalam rentang waktu lima tahun terakhir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan publik, seperti stimulus fiskal, bantuan sosial, dan subsidi energi, berperan penting dalam menjaga stabilitas ekonomi dan melindungi masyarakat, khususnya kelompok rentan. Namun, efektivitas kebijakan tersebut masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan data, ketidaktepatan sasaran, lemahnya koordinasi antar lembaga, serta belum optimalnya pemanfaatan teknologi digital. Selain itu, kebijakan publik dalam situasi krisis juga menimbulkan dilema antara menjaga stabilitas ekonomi dan perlindungan sosial masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan reformasi kebijakan

yang lebih adaptif, berbasis bukti (evidence-based policy), serta didukung oleh digitalisasi layanan publik dan kolaborasi lintas sektor. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kebijakan publik yang lebih responsif dan berkelanjutan dalam menghadapi krisis global di masa depan.

**Kata Kunci:** Kebijakan Publik, Krisis Global, Geopolitik, Dampak Sosial Ekonomi, Evidence-Based Policy

**Abstract:** This study aims to analyze the role of public policy in addressing global crises and to examine its impact on society in economic, social, and institutional contexts. Global crises triggered by the COVID-19 pandemic and geopolitical conflicts, such as tensions between the United States, Israel, and Iran, have created significant pressures on global economic stability, including rising energy prices, inflation, and disruptions in global supply chains. This study employs a descriptive qualitative approach using a literature-based analysis method, drawing on national and international scientific journals, global institutional reports, and official government documents within the last five years. The findings indicate that public policies, such as fiscal stimulus, social assistance, and energy subsidies, play a crucial role in maintaining economic stability and protecting vulnerable groups. However, the effectiveness of these policies is still constrained by several challenges, including data limitations, inaccurate targeting, weak inter-agency coordination, and the suboptimal use of digital technology. Furthermore, public policy in crisis situations often involves trade-offs between economic stability and social protection. Therefore, more adaptive and evidence-based policy reforms are required, supported by digitalization and cross-sector collaboration. This study contributes to the development of more responsive and sustainable public policies in addressing future global crises.

**Keywords:** Public Policy, Global Crisis, Geopolitics, Socio-Economic Impact, Evidence-Based Policy

## Pendahuluan

Krisis global dewasa ini semakin menunjukkan kompleksitas yang tinggi seiring dengan meningkatnya dinamika geopolitik internasional. Salah satu isu yang saat ini menjadi perhatian dunia adalah eskalasi konflik antara Amerika Serikat dan Israel dengan Iran yang memicu ketegangan di kawasan Timur Tengah. Konflik tersebut tidak hanya berdampak pada stabilitas kawasan, tetapi juga menimbulkan kekhawatiran global terkait gangguan rantai pasok energi, khususnya minyak dunia, mengingat kawasan tersebut merupakan jalur strategis distribusi energi internasional (Ansell, 2021). Situasi ini memperlihatkan bahwa konflik geopolitik modern memiliki implikasi yang luas, tidak hanya pada aspek keamanan, tetapi juga terhadap stabilitas ekonomi global.

Dampak dari konflik tersebut mulai dirasakan secara nyata di berbagai negara, terutama melalui kenaikan harga energi dan tekanan inflasi global. Lonjakan harga minyak akibat terganggunya jalur distribusi di kawasan Timur Tengah berpotensi meningkatkan biaya produksi dan distribusi di berbagai sektor ekonomi, sehingga berdampak pada daya beli masyarakat. Selain itu, lembaga keuangan internasional juga memperingatkan bahwa konflik ini dapat memicu tekanan pada sistem keuangan global serta memperlambat pertumbuhan ekonomi dunia, terutama jika eskalasi konflik terus berlanjut (Coombs, 2021). Kondisi ini menunjukkan bahwa krisis global yang dipicu oleh konflik geopolitik memiliki efek domino yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat di tingkat global maupun nasional.

Secara konseptual, krisis global bukanlah fenomena baru, namun intensitas dan skalanya semakin meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Krisis kesehatan seperti pandemi COVID-19, krisis ekonomi global, serta krisis lingkungan akibat perubahan iklim telah memperlihatkan bagaimana sistem global saling terhubung dan rentan terhadap guncangan eksternal. Di Indonesia, dampak krisis global tercermin dari fluktuasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan angka kemiskinan, serta tekanan terhadap sektor informal yang menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat (BPS, 2023). Hal ini menegaskan bahwa krisis global memiliki karakter multidimensional yang memerlukan respons kebijakan yang komprehensif.

Dalam hal tersebut, kebijakan publik memegang peranan penting sebagai instrumen utama pemerintah dalam merespons dan mengendalikan dampak krisis. Kebijakan seperti stimulus ekonomi, bantuan sosial, serta pengaturan aktivitas masyarakat merupakan bentuk intervensi negara untuk menjaga stabilitas sosial dan ekonomi (Development, 2021). Namun, efektivitas kebijakan tersebut sangat bergantung pada kapasitas pemerintah dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan secara tepat, cepat, dan adaptif terhadap dinamika krisis. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas kebijakan publik menjadi faktor kunci dalam menentukan keberhasilan penanggulangan krisis global.

Di berbagai negara, respons kebijakan terhadap krisis global menunjukkan variasi yang signifikan. Negara dengan sistem tata kelola yang baik dan berbasis data cenderung mampu merespons krisis secara lebih efektif dibandingkan negara dengan kapasitas kelembagaan yang terbatas (Hale, 2021). Di Indonesia, pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan strategis dalam menghadapi krisis, seperti program bantuan sosial dan pemulihan ekonomi nasional. Meskipun demikian, implementasi kebijakan tersebut masih menghadapi berbagai kendala, seperti ketidaktepatan sasaran, keterbatasan data, serta lemahnya koordinasi antar lembaga (Prasetyo, 2022).

Selain itu, kebijakan publik dalam situasi krisis seringkali menimbulkan dampak yang bersifat dilematis bagi masyarakat. Di satu sisi, kebijakan pembatasan aktivitas bertujuan untuk melindungi kesehatan masyarakat, namun di sisi lain dapat menurunkan aktivitas ekonomi dan meningkatkan angka pengangguran. Kondisi ini mencerminkan adanya trade-off dalam kebijakan publik, di mana pemerintah harus menyeimbangkan antara kepentingan kesehatan dan stabilitas ekonomi masyarakat. Dampak tersebut juga dirasakan secara tidak merata, terutama oleh kelompok masyarakat rentan yang memiliki keterbatasan akses terhadap sumber daya ekonomi (United Nations Educational, 2022).

Selain itu, berbagai penelitian menunjukkan bahwa salah satu permasalahan utama dalam kebijakan publik adalah adanya kesenjangan antara perencanaan dan implementasi kebijakan. Banyak kebijakan yang secara normatif telah dirancang dengan baik, namun tidak berjalan optimal di lapangan akibat keterbatasan sumber daya, kurangnya koordinasi, serta minimnya pemanfaatan teknologi dan data (Nugroho, 2022). Selain itu, aspek transparansi dan akuntabilitas juga menjadi tantangan dalam pelaksanaan kebijakan, terutama dalam situasi krisis yang menuntut kecepatan pengambilan keputusan.

Dari perspektif masyarakat, dampak kebijakan publik selama krisis tidak hanya terbatas pada aspek ekonomi, tetapi juga mencakup dimensi sosial dan psikologis. Ketidakpastian ekonomi, penurunan pendapatan, serta perubahan pola kehidupan sosial dapat meningkatkan tekanan mental dan memperburuk kualitas hidup masyarakat (World Health Organization, 2021). Di sisi lain, keterbatasan akses terhadap layanan publik selama krisis juga berpotensi memperlebar kesenjangan sosial, terutama di negara berkembang.

Dalam perkembangan kebijakan publik modern, pendekatan berbasis bukti (evidence-based policy) dan pemanfaatan teknologi digital menjadi faktor penting dalam meningkatkan efektivitas kebijakan. Penggunaan data real-time dan sistem digitalisasi layanan publik memungkinkan pemerintah untuk merespons krisis secara lebih cepat dan tepat sasaran (Coombs, 2021). Namun demikian, penerapan pendekatan ini masih menghadapi berbagai tantangan, terutama di negara berkembang yang memiliki keterbatasan infrastruktur digital dan kapasitas sumber daya manusia.

Oleh karena itu, kajian mengenai kebijakan publik dalam penanggulangan krisis global menjadi sangat penting untuk dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk

menganalisis bagaimana kebijakan publik dirumuskan dan diimplementasikan dalam menghadapi krisis global, serta mengkaji dampaknya terhadap masyarakat dari berbagai aspek. Selain itu, penelitian ini juga berupaya mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas kebijakan serta memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih adaptif, responsif, dan berbasis data dalam menghadapi krisis global di masa depan.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu pendekatan yang bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena kebijakan publik dalam hal penanggulangan krisis global melalui analisis data non-numerik. Pendekatan ini dipilih karena krisis global merupakan fenomena yang kompleks dan multidimensional, yang tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi, tetapi juga mencakup dimensi sosial, politik, dan kelembagaan. Dengan demikian, pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk menggali secara komprehensif bagaimana kebijakan publik dirumuskan dan diimplementasikan dalam merespons krisis, serta bagaimana dampaknya dirasakan oleh masyarakat secara luas (Creswell, 2021).

Metode penelitian yang digunakan adalah analisis literatur (*literature-based analysis*), yaitu teknik penelitian yang menitikberatkan pada pengumpulan dan analisis data sekunder dari berbagai sumber yang relevan. Sumber data dalam penelitian ini meliputi jurnal ilmiah nasional yang terindeks SINTA, jurnal internasional bereputasi, laporan lembaga global seperti World Bank dan OECD, serta dokumen resmi pemerintah Indonesia seperti publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) dan kementerian terkait. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memperoleh gambaran yang luas dan komprehensif mengenai respons kebijakan publik terhadap krisis global di berbagai negara, sekaligus membandingkannya dengan hal nasional Indonesia (Sugiyono, 2021).

Proses penelitian diawali dengan tahap reduksi data, yaitu menyeleksi dan mengklasifikasikan sumber literatur yang relevan dengan topik kebijakan publik dan krisis global dalam rentang waktu lima tahun terakhir. Tahap ini bertujuan untuk memastikan bahwa data yang digunakan bersifat mutakhir, valid, dan sesuai dengan perkembangan isu global terkini. Literatur yang digunakan difokuskan pada kajian mengenai kebijakan penanggulangan krisis, seperti kebijakan stimulus ekonomi, bantuan sosial, serta kebijakan mitigasi krisis lainnya yang berdampak langsung terhadap masyarakat (BPS, 2023).

Selanjutnya, dilakukan analisis isi (*content analysis*) terhadap berbagai dokumen kebijakan dan literatur yang telah dikumpulkan. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola, strategi, dan arah kebijakan publik yang diterapkan dalam menghadapi krisis global. Dalam tahap ini, peneliti mengkaji hubungan antara tujuan kebijakan dengan hasil implementasi yang dicapai, serta menganalisis dampaknya terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami secara lebih mendalam efektivitas kebijakan publik dalam merespons

krisis serta mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi dalam implementasinya (Krippendorff, 2020).

Tahap berikutnya adalah sintesis tematik (*thematic synthesis*), yaitu proses pengelompokan dan pengintegrasian temuan penelitian berdasarkan tema-tema utama yang relevan. Tema yang dianalisis meliputi efektivitas kebijakan publik, dampak sosial-ekonomi krisis, kapasitas kelembagaan pemerintah, serta pemanfaatan teknologi dalam pengambilan kebijakan. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat mengidentifikasi pola hubungan serta kesenjangan antara konsep teoritis kebijakan publik dengan praktik implementasinya di lapangan, baik dalam hal global maupun nasional (Prasetyo H. , 2022).

Untuk meningkatkan validitas dan keabsahan hasil penelitian, digunakan teknik triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan berbagai referensi dari tingkat nasional dan internasional. Triangulasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa data yang digunakan bersifat objektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dengan menggabungkan berbagai sumber, penelitian ini mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai dinamika kebijakan publik dalam penanggulangan krisis global serta dampaknya terhadap masyarakat (Lestari, 2023).

Pendekatan kualitatif deskriptif dalam penelitian ini tidak hanya berfungsi untuk menggambarkan fenomena, tetapi juga untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan yang berbasis bukti (*evidence-based policy*). Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi referensi bagi pemerintah dan pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan yang lebih adaptif, responsif, dan berkelanjutan dalam menghadapi berbagai bentuk krisis global di masa depan, khususnya dalam hal Indonesia sebagai bagian dari sistem global (Prasetyo A. d., 2022)..

## **Hasil dan Pembahasan**

Berdasarkan uraian-uraian sebelumnya dan beberapa teori terkait isu topik bahasan disini, ada beberapa teori yang sangat kuat dan mendukung permasalahan disini, berikut ini adalah beberapa teori tersebut.

### **Teori Public Policy (Dunn dan Anderson)**

Teori kebijakan publik menjelaskan bahwa kebijakan merupakan proses sistematis yang mencakup identifikasi masalah hingga evaluasi kebijakan. Pendekatan ini menekankan bahwa setiap tahap kebijakan harus dirancang secara rasional dan berbasis data agar efektif dalam menyelesaikan masalah publik. Dalam krisis global, ketepatan dalam merumuskan masalah menjadi faktor penting dalam menentukan arah kebijakan pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa kegagalan pada tahap awal dapat berdampak pada keseluruhan implementasi kebijakan (Kurniawan, 2023). Selain itu, teori yang dikemukakan oleh William N. Dunn menekankan pentingnya analisis kebijakan sebagai

dasar dalam pengambilan keputusan publik. Sementara itu, James E. Anderson melihat kebijakan sebagai tindakan pemerintah yang memiliki tujuan tertentu dalam merespons masalah masyarakat. Dalam praktiknya, kebijakan publik seringkali dipengaruhi oleh dinamika politik dan tekanan sosial yang berkembang. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang fleksibel agar kebijakan dapat menyesuaikan dengan perubahan kondisi global.

### **Teori Governance**

Konsep governance menekankan pentingnya tata kelola yang melibatkan berbagai aktor dalam proses pengambilan keputusan publik (Ansell, 2021). Pendekatan ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak lagi menjadi satu-satunya aktor dalam kebijakan, melainkan harus berkolaborasi dengan sektor swasta dan masyarakat. Dalam situasi krisis global, tata kelola yang baik menjadi kunci dalam menciptakan kebijakan yang responsif dan adaptif. Hal ini menunjukkan bahwa koordinasi antar aktor sangat menentukan efektivitas kebijakan publik. Good governance juga menekankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam proses kebijakan. Prinsip ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan dapat diterima oleh masyarakat dan berjalan secara optimal (Wicaksono, 2022). Dalam konteks Indonesia, tantangan governance masih berkaitan dengan koordinasi antar lembaga dan integrasi data. Oleh karena itu, penguatan tata kelola menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kualitas kebijakan publik.

### **Teori Crisis Management**

Teori manajemen krisis menjelaskan bahwa pemerintah harus memiliki kesiapan dalam menghadapi situasi darurat melalui perencanaan dan koordinasi yang matang. Pendekatan ini menekankan pentingnya respon cepat dalam meminimalkan dampak krisis terhadap masyarakat (Putri, 2022). Dalam krisis global, keterlambatan dalam pengambilan keputusan dapat memperburuk kondisi sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, manajemen krisis menjadi bagian penting dalam kebijakan publik modern. Selain itu, manajemen krisis juga menekankan pentingnya komunikasi publik yang efektif untuk menjaga stabilitas sosial. Informasi yang jelas dan transparan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah (Sari, 2022). Dalam konteks Indonesia, tantangan utama dalam manajemen krisis adalah keterbatasan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia. Hal ini menunjukkan bahwa penguatan sistem manajemen krisis menjadi kebutuhan mendesak dalam menghadapi krisis global.

### **Kondisi Krisis Global dan Respons Kebijakan Publik**

Krisis global dalam beberapa tahun terakhir tidak hanya dipicu oleh faktor ekonomi dan kesehatan, tetapi juga oleh meningkatnya ketegangan geopolitik internasional. Salah satu isu yang saat ini menjadi perhatian global adalah konflik antara Amerika Serikat dan Israel dengan Iran yang berpotensi memicu krisis energi dunia. Kawasan Timur Tengah sebagai pusat produksi dan distribusi minyak dunia memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas energi global, sehingga konflik di wilayah tersebut berdampak langsung terhadap pasokan energi internasional. Gangguan distribusi minyak, terutama di jalur strategis seperti Selat Hormuz, dapat menyebabkan penurunan pasokan minyak global dan mendorong lonjakan harga energi secara signifikan (Reuters, 2026).

Dampak dari konflik tersebut mulai dirasakan secara nyata oleh berbagai negara, termasuk Indonesia, terutama melalui kenaikan harga minyak dunia yang berimbas pada harga bahan bakar minyak (BBM) domestik. Indonesia sebagai negara net importir minyak sangat rentan terhadap fluktuasi harga energi global, sehingga kenaikan harga minyak akan meningkatkan beban subsidi energi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta berpotensi memicu inflasi. Selain itu, kenaikan harga energi juga berdampak pada meningkatnya biaya produksi dan distribusi, yang pada akhirnya menyebabkan kenaikan harga barang dan jasa di masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa konflik geopolitik tidak hanya berdampak pada sektor energi, tetapi juga memiliki implikasi luas terhadap stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat (Sari M. , 2022).

Kenaikan harga minyak dunia akibat konflik tersebut juga menimbulkan efek berantai terhadap sektor lain, seperti pangan dan industri. Biaya distribusi yang meningkat menyebabkan harga bahan pokok ikut naik, sehingga memperburuk daya beli masyarakat, khususnya kelompok berpendapatan rendah. Selain itu, tekanan terhadap nilai tukar dan inflasi impor menjadi tantangan tambahan bagi negara berkembang dalam menjaga stabilitas ekonomi domestik. Dalam hal ini, pemerintah dituntut untuk mengambil kebijakan yang adaptif dan responsif guna mengendalikan dampak krisis global yang bersumber dari konflik geopolitik (Ramadhan, 2023).

Krisis global dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan eskalasi yang semakin kompleks dan saling terhubung antar sektor, baik ekonomi, politik, maupun sosial. Fenomena ini diperparah oleh meningkatnya ketegangan geopolitik, seperti konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran yang memicu ketidakpastian global, terutama dalam sektor energi dan perdagangan internasional. Kawasan Timur Tengah sebagai pusat distribusi energi dunia memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas harga minyak global, sehingga setiap konflik yang terjadi di kawasan tersebut berpotensi menimbulkan efek domino terhadap negara lain. Dampak ini tidak hanya dirasakan oleh negara maju, tetapi juga negara berkembang seperti Indonesia yang masih bergantung pada impor energi dan stabilitas pasar global (Sørensen, 2020). Selain itu, krisis geopolitik juga berdampak

pada terganggunya rantai pasok global yang menyebabkan kenaikan harga barang dan jasa secara signifikan di berbagai negara.

Selain faktor geopolitik, krisis global juga dipicu oleh pandemi COVID-19 yang memberikan dampak luar biasa terhadap sistem ekonomi dan sosial di seluruh dunia. Pandemi tersebut menyebabkan gangguan besar terhadap aktivitas produksi, distribusi, dan konsumsi, sehingga mengakibatkan kontraksi ekonomi di berbagai negara. Di Indonesia, dampak pandemi terlihat dari menurunnya pertumbuhan ekonomi, meningkatnya angka pengangguran, serta bertambahnya jumlah penduduk miskin. Meskipun pemerintah telah melakukan berbagai upaya pemulihan, dampak jangka panjang dari krisis tersebut masih dirasakan hingga saat ini, terutama dalam bentuk ketimpangan ekonomi dan kerentanan sosial masyarakat (BPS, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa krisis global memiliki karakteristik yang tidak hanya bersifat sementara, tetapi juga berpotensi mengubah struktur ekonomi dan sosial secara mendasar.

Dalam menghadapi krisis global tersebut, kebijakan publik menjadi instrumen utama yang digunakan pemerintah untuk menjaga stabilitas nasional dan melindungi masyarakat. Berbagai kebijakan telah diterapkan, seperti stimulus fiskal, bantuan sosial, subsidi energi, serta program pemulihan ekonomi nasional. Kebijakan ini bertujuan untuk menjaga daya beli masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta mengurangi dampak negatif krisis terhadap kelompok rentan. Di Indonesia, kebijakan seperti Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) menjadi salah satu langkah strategis dalam menjaga stabilitas ekonomi selama masa krisis. Namun demikian, efektivitas kebijakan tersebut sangat bergantung pada kemampuan pemerintah dalam mengelola sumber daya, mengoordinasikan antar lembaga, serta memastikan distribusi kebijakan yang tepat sasaran (Lestari S. , 2022).

Meskipun berbagai kebijakan telah diterapkan, respons kebijakan publik terhadap krisis global menunjukkan hasil yang beragam di berbagai negara. Negara dengan sistem tata kelola yang kuat dan berbasis teknologi cenderung lebih mampu merespons krisis secara cepat dan efektif dibandingkan negara dengan kapasitas kelembagaan yang terbatas. Hal ini terlihat dari keberhasilan beberapa negara dalam mengendalikan dampak krisis melalui kebijakan berbasis data dan koordinasi yang baik antar sektor. Di sisi lain, negara berkembang masih menghadapi berbagai kendala dalam implementasi kebijakan, seperti keterbatasan anggaran, kurangnya integrasi data, serta rendahnya kualitas sumber daya manusia dalam pengelolaan kebijakan publik (Prasetyo A. d., 2022).

### **Dampak Kebijakan Publik terhadap Masyarakat**

Kebijakan publik yang diterapkan dalam menghadapi krisis global memiliki dampak yang signifikan terhadap kehidupan masyarakat, baik dalam aspek ekonomi, sosial,

maupun kesejahteraan secara umum. Dari sisi ekonomi, kebijakan stimulus dan bantuan sosial terbukti mampu menjaga daya beli masyarakat serta mencegah peningkatan angka kemiskinan secara drastis. Bantuan sosial yang diberikan pemerintah, seperti bantuan langsung tunai dan subsidi energi, menjadi penopang utama bagi masyarakat berpenghasilan rendah dalam menghadapi tekanan ekonomi selama krisis (BPS, 2023). Namun demikian, kebijakan tersebut juga memiliki keterbatasan dalam hal jangkauan dan ketepatan sasaran, terutama bagi kelompok masyarakat yang tidak terdata secara formal dalam sistem administrasi pemerintah (Hidayat, 2023).

Di sisi lain, kebijakan pembatasan aktivitas masyarakat yang diterapkan selama krisis, seperti lockdown atau pembatasan sosial, memberikan dampak negatif terhadap sektor ekonomi, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Banyak pelaku usaha mengalami penurunan pendapatan bahkan terpaksa menghentikan usahanya akibat terbatasnya aktivitas ekonomi. Kondisi ini berdampak pada meningkatnya angka pengangguran serta menurunnya stabilitas ekonomi rumah tangga, terutama di sektor informal yang tidak memiliki perlindungan sosial yang memadai (Webster, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan publik dalam situasi krisis seringkali menghadapi dilema antara menjaga kesehatan masyarakat dan mempertahankan aktivitas ekonomi.

Selain dampak ekonomi, kebijakan publik juga memiliki implikasi sosial yang cukup signifikan. Krisis global telah memperburuk ketimpangan sosial, terutama bagi kelompok masyarakat rentan seperti pekerja informal, perempuan, dan masyarakat berpenghasilan rendah. Ketidakmerataan akses terhadap bantuan sosial dan layanan publik menjadi salah satu faktor yang memperparah kondisi tersebut. Di Indonesia, masih terdapat kesenjangan dalam distribusi bantuan sosial antara wilayah perkotaan dan pedesaan, yang menunjukkan perlunya perbaikan dalam sistem pendataan dan distribusi kebijakan (Firmansyah, 2023).

Dari perspektif psikologis, krisis global juga berdampak pada meningkatnya tingkat stres, kecemasan, dan ketidakpastian di kalangan masyarakat. Pembatasan aktivitas sosial, ketidakpastian ekonomi, serta perubahan pola kehidupan sehari-hari menyebabkan tekanan mental yang cukup tinggi, terutama bagi kelompok masyarakat yang terdampak langsung oleh krisis. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan publik dalam penanggulangan krisis tidak hanya harus memperhatikan aspek ekonomi, tetapi juga aspek sosial dan psikologis masyarakat (Coombs, 2021).

### **Tantangan Implementasi Kebijakan Publik**

Salah satu tantangan utama dalam kebijakan publik adalah kesenjangan antara perencanaan dan implementasi kebijakan. Banyak kebijakan yang dirancang secara komprehensif, namun tidak berjalan optimal di lapangan akibat berbagai kendala

struktural dan teknis. Keterbatasan data yang akurat dan mutakhir menjadi salah satu faktor utama yang menghambat efektivitas kebijakan, terutama dalam penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan (Nugroho, 2022). Selain itu, kurangnya koordinasi antar lembaga pemerintah juga menyebabkan terjadinya tumpang tindih kebijakan dan inefisiensi dalam pelaksanaannya.

Kendala lain yang dihadapi adalah keterbatasan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia dalam mengelola kebijakan publik, terutama dalam situasi krisis yang membutuhkan respons cepat dan tepat. Di negara berkembang seperti Indonesia, masih terdapat tantangan dalam hal digitalisasi layanan publik, integrasi data antar lembaga, serta kesiapan birokrasi dalam mengadopsi teknologi baru (Prasetyo A. d., 2022). Hal ini menyebabkan kebijakan yang seharusnya dapat diimplementasikan secara efektif menjadi kurang optimal dalam praktiknya.

Selain itu, rendahnya tingkat transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan kebijakan juga menjadi tantangan yang signifikan. Dalam situasi krisis, pemerintah dituntut untuk mengambil keputusan secara cepat, namun hal ini seringkali mengurangi tingkat pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan. Akibatnya, muncul berbagai permasalahan seperti penyalahgunaan anggaran dan ketidaktepatan sasaran kebijakan (Firmansyah, 2023). Kondisi ini menunjukkan pentingnya penguatan sistem pengawasan dan akuntabilitas dalam kebijakan publik.

## Diskusi

Berdasarkan hasil analisis, kebijakan publik dalam penanggulangan krisis global memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat. Namun, efektivitas kebijakan tersebut masih dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kualitas perencanaan, kapasitas implementasi, serta tingkat koordinasi antar lembaga. Salah satu permasalahan utama adalah ketidaksesuaian antara kebijakan yang dirancang dengan kebutuhan masyarakat di lapangan, terutama dalam hal distribusi bantuan sosial dan program pemulihan ekonomi (BPS, 2023).

Selain itu, krisis global juga menegaskan pentingnya pendekatan kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*). Penggunaan data yang akurat dan *real-time* sangat diperlukan untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil dapat memberikan dampak yang optimal bagi masyarakat. Namun, dalam praktiknya, masih banyak negara yang belum mampu mengoptimalkan penggunaan data dalam proses pengambilan kebijakan, terutama di negara berkembang yang memiliki keterbatasan infrastruktur digital (Capano, 2020).

Dari sisi kebijakan, diperlukan pendekatan yang lebih adaptif dan fleksibel dalam menghadapi krisis global yang dinamis. Pemerintah harus mampu menyesuaikan

kebijakan dengan kondisi yang terus berubah serta melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan. Kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat menjadi kunci dalam menciptakan kebijakan yang efektif dan berkelanjutan.

### Pembaharuan Kebijakan

Dalam rangka meningkatkan efektivitas kebijakan publik, diperlukan reformasi kebijakan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah memperkuat sistem perlindungan sosial melalui integrasi data berbasis digital. Sistem ini memungkinkan pemerintah untuk mengidentifikasi kelompok masyarakat yang membutuhkan bantuan secara lebih akurat dan memastikan distribusi bantuan yang tepat sasaran (Howlett, 2020). Selain itu, digitalisasi layanan publik menjadi strategi penting dalam meningkatkan responsivitas kebijakan. Pemanfaatan teknologi informasi dapat membantu pemerintah dalam mengakses data secara real-time serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan kebijakan (United Nations Educational, 2022).

Penguatan sektor ekonomi lokal, khususnya UMKM, juga menjadi kunci dalam meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat. Pemerintah perlu memberikan dukungan dalam bentuk akses pembiayaan, pelatihan, serta insentif fiskal untuk membantu UMKM bertahan dan berkembang di tengah krisis global. Selain itu, peningkatan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan lembaga pendidikan juga diperlukan untuk menciptakan kebijakan yang lebih inklusif. Kemitraan ini dapat diwujudkan melalui program pelatihan kerja, inovasi teknologi, serta pengembangan sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan pasar global (Reuters, 2026). Secara keseluruhan, kebijakan publik dalam penanggulangan krisis global harus diarahkan pada pendekatan yang adaptif, berbasis data, dan kolaboratif. Dengan demikian, kebijakan yang dihasilkan tidak hanya mampu merespons krisis secara efektif, tetapi juga dapat meningkatkan ketahanan masyarakat dalam menghadapi berbagai tantangan global di masa depan.

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik memegang peran yang sangat krusial dalam menghadapi krisis global yang semakin kompleks dan multidimensional, baik yang dipicu oleh pandemi seperti COVID-19 maupun konflik geopolitik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Krisis tersebut berdampak luas terhadap stabilitas ekonomi, sosial, dan kesejahteraan masyarakat, sehingga kebijakan seperti stimulus ekonomi, bantuan sosial, dan subsidi energi menjadi instrumen penting dalam menjaga stabilitas dan melindungi kelompok rentan. Namun, efektivitas kebijakan masih

dipengaruhi oleh berbagai tantangan, seperti keterbatasan data, lemahnya koordinasi antar lembaga, rendahnya transparansi, serta belum optimalnya pemanfaatan teknologi digital, sehingga diperlukan reformasi kebijakan yang lebih adaptif, berbasis data, dan berkelanjutan.

### Daftar Pustaka

- Antara. (2026). Dampak konflik Timur Tengah terhadap harga energi global.
- Ansell, C. (2021). Governance in crisis situations. *Public Administration Review*, 81(5), 949–960.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). (2023). Laporan pembangunan nasional Indonesia.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2023). Indikator ekonomi Indonesia 2023. BPS RI.
- Bank Indonesia. (2023). Laporan perekonomian Indonesia 2023.
- Boin, A. (2021). Crisis management and public leadership. *Public Management Review*, 23(1), 1–10.
- Cairney, P. (2020). Understanding public policy responses. *Policy Studies Journal*, 48(1), 1–10.
- Capano, G. (2020). Policy design and crisis response. *Policy Sciences*, 53(3), 321–339.
- Coombs, W. T. (2021). Crisis communication revisited. *Journal of Contingencies and Crisis Management*, 29(2), 123–130.
- Creswell, J. W., dan Poth, C. N. (2021). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). (2026). Analisis dampak konflik global terhadap ekonomi nasional.
- Fischer, F. (2020). Evidence-based policy revisited. *Policy Studies Journal*, 48(2), 289–300.
- Firmansyah, D. (2023). Transformasi digital dalam kebijakan publik. *Jurnal Administrasi Negara*, 11(2), 145–158.
- Hadi, S. (2023). Reformasi birokrasi dan governance. *Jurnal Administrasi Publik Indonesia*, 10(2), 150–165.
- Hale, T., Angrist, N., Goldszmidt, R., Kira, B., Petherick, A., Phillips, T., Webster, S., Cameron-Blake, E., Hallas, L., Majumdar, S., dan Tatlow, H. (2021). A global panel database of pandemic policies. *Nature Human Behaviour*, 5(4), 529–538.
- Hidayat, R. (2023). Tata kelola pemerintahan dalam krisis. *Jurnal Governance Indonesia*, 9(1), 33–47.
- Howlett, M. (2020). Policy making in uncertain times. *Public Policy and Administration*, 35(4), 379–395.
- IDN Times. (2026). Dampak konflik Iran dan Israel terhadap ekonomi global.

- International Labour Organization (ILO). (2021). *World employment and social outlook: Trends 2021*.
- International Monetary Fund (IMF). (2024). *World economic outlook: Global economic recovery and uncertainty*.
- International Monetary Fund (IMF). (2026). *Global economic risks from geopolitical tensions*.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2022). *Program pemulihan ekonomi nasional (PEN)*.
- Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. (2023). *Laporan perkembangan UMKM Indonesia*.
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2022). *Evaluasi penyaluran bantuan sosial nasional*.
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (2022). *Laporan pengawasan pengelolaan anggaran negara*.
- Kompas. (2025). *Dampak konflik Timur Tengah terhadap harga minyak dunia*.
- Krippendorff, K. (2020). *Content analysis: An introduction to its methodology (4th ed.)*. SAGE Publications.
- Kurniawan, T. (2023). Analisis kebijakan publik di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Publik*, 14(1), 12–25.
- Lestari, S. (2022). Kebijakan berbasis data di Indonesia. *Jurnal Administrasi Publik*, 10(2), 88–102.
- Lestari, D. (2023). Kapasitas kelembagaan dalam kebijakan publik. *Jurnal Administrasi Negara*, 12(1), 33–47.
- Nugraha, A. (2022). Implementasi kebijakan publik. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 8(1), 55–70.
- Nugroho, R., dan Sari, D. (2022). Implementasi kebijakan publik dalam penanganan krisis sosial di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Publik Indonesia*, 7(2), 101–115.
- Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (2021). *Government at a glance 2021*.
- Peters, B. G. (2021). Governance and policy problems. *Public Organization Review*, 21(1), 1–15.
- Prasetyo, A., dan Zuhdi, U. (2022). Digital governance dan tantangan implementasi kebijakan publik di Indonesia. *Jurnal Administrasi Publik*, 10(1), 45–60.
- Prasetyo, H. (2022). Koordinasi kebijakan publik. *Jurnal Kebijakan Nasional*, 6(2), 90–105.
- Pratama, R. (2023). Inovasi kebijakan publik. *Jurnal Manajemen Publik*, 7(2), 101–115.
- Putri, D. (2022). Manajemen krisis di sektor publik. *Jurnal Kebijakan Sosial*, 5(2), 77–90.
- Ramadhan, F. (2023). Evaluasi kebijakan berbasis bukti. *Jurnal Administrasi Indonesia*, 12(1), 60–74.

- Reuters. (2026). Middle East conflict and global oil supply disruption.
- Sari, M. (2022). Dampak kebijakan publik terhadap masyarakat. *Jurnal Sosial dan Politik*, 6(1), 23–38.
- Santoso, B. (2023). Manajemen krisis dalam pemerintahan. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 9(2), 120–135.
- Sørensen, E. (2020). Interactive governance theory. *Public Administration*, 98(3), 654–668.
- Sugiyono. (2021). *Metode penelitian kualitatif*. Alfabeta.
- United Nations Development Programme (UNDP). (2022). *Human development report 2022*.
- United Nations Department of Economic and Social Affairs (UNDESA). (2022). *E-government survey 2022*.
- United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO). (2022). *Global education monitoring report*.
- Weible, C. (2020). COVID-19 and policy processes. *Policy Sciences*, 53(2), 225–241.
- Wicaksono, A. (2022). Governance dan kolaborasi kebijakan. *Jurnal Politik dan Pemerintahan*, 11(1), 70–85.
- World Bank. (2022). *World development report 2022: Finance for an equitable recovery*.
- World Health Organization (WHO). (2021). *Mental health and COVID-19 pandemic report*.